

ISSN : 1412 - 2715

EKSPOSIE

JURNAL HUKUM DAN PENDIDIKAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

P3M STAIN WATAMPONE

EDISI : VOL. XXIII PERIODE JULI - DESEMBER 2014

JURNAL EKSPOSE

VOL. XXIII

NO. 2

HAL. 1-164

WATAMPONE 2014

ISSN : 1412 - 2715

EKSPOSE

Jurnal Hukum dan Pendidikan

Media Informasi dan Komunikasi Pengabdian pada Masyarakat

Edisi : Vol. XXIII Periode Juli-Desember 2014

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag

REDAKTUR

Drs. Husaini, M.Si

Drs. Sulaeman Rafi

PENYUNTING/ EDITOR

Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum

Abd. Rasyid R, S.Pd.,M.Pd

DESAIN GRAFIK

Syafuruddin, S.Ag

A. Ashrullah, S.EI

SEKRETARIAT

Husain Rafi, S.Sos.,M.Si

Ismail Keri, S.Ag

Zakia, S.Pd

PENERBIT

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M)

STAIN Watampone

ALAMAT REDAKSI

Kantor P3M STAIN Watampone

Jl. Hos. Cokroaminoto

Telp. (0481) 26653,27513,26513,26153,21395 Fax. 23928 Watampone

Redaksi mengundang para pakar, sarjana muslim untuk menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Redaksi berhak mengedit naskah yang masuk tanpa merubah maksud dan isinya.

EKSPOSE
Jurnal Hukum dan Pendidikan

DAFTAR ISI

	Hal
MASJID DENGAN KONSEP FILANTROPI WAKAF PRODUKTIF A.Sarjan.....	1-11
MENUJU KEPALA SEKOLAH YANG PROFESIONAL H. M. Rapi Anci.....	12-22
PERGURUAN TINGGI SEBAGAI SUATU ORGANISASI PEMBELAJARAN (MIKRO DAN MAKRO) Abu Bakar.....	23-37
BUNGA DAN RESIKO DALAM PERSPEKTIF INVESTASI SYARIAH Abd. Hafid.....	38-52
MISTISISME ISLAM (Sebuah Dilema dan Tinjauan Masa Depan) Abdul Hakim.....	53-66
POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA AJANGPULU KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE <u>Abd. Rasyid R.</u>	67-77
MENGHADAP KIBLAT PADA SAAT SHALAT (Tinjauan Fikih dan Sains) A. Agus Alam.....	78-96

CONTRIBUTION AND RESPONSIBILITY OF INTELLECTUALS IN TRANSLATION OF RELIGIOUS TEXT: (A Study of Translation Techniques of Religious Expression)	97-110
Muhammad Zuhri Dj.....	
AL DARAARU YUZALU (SALAH SATU KAIDAH USHULIYAH) YANG BERKESESUAIAN DENGAN KONDISI MEMBAHAYAKAN DAN MENYULITKAN	111-125
Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.....	
URGENSI EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA STAIN WATAMPONE	126-134
Kasmah.....	
KEBERADAAN PASAR MODERN TERHADAP PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (Studi Dampak Keberadaan Alfamidi terhadap Pedagang Eks Pasar Sentral di Kabupaten Bone)	134-155
Syahrianti Syam.....	
SEKULARISASI DAN ISLAMISASI ILMU: Telaah Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis Ilmu	156-164
Indo Santalia.....	

POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA AJANGPULU KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE

Oleh :
Abd. Rasyid R

Abstract

This study discusses the community economic potency and its problems in Cina Village, Ajangpulu District of Bone Regency. It aims to determine: (1) The economic potency of Cina Village, Ajangpulu District of Bone Regency. (2) The problems faced by the community in managing the economic potency Cina Village, Ajangpulu District of Bone Regency. This research is a descriptive survey. The results show that: (1) The economic potency in Cina Village, Ajangpulu District of Bone Regency is potential in agriculture, plantations and farms. The various potencies of Cina Village, Ajangpulu District of Bone Regency then facilitate the development of a region that increases the welfare of the local community. (2) Problems for village potency are both from limited human resources and natural resources. However, the most fundamental problem is infrastructure that supports the development of the village and the increase of economic movement which was very limited. (3) The solution for the village potency is divided in two: *first*, the structural approach that is well-organized structure and system of relationships between all the components and systems of life, both in rural areas of Ajangpulu and related supporting components, including social, economic and physical components. Hopefully the wider community get a chance to be able to use natural resources in a sustainable manner. *Second*, the subjective approach (non-structural), which is the approach that puts human beings as subjects who have the discretion to take the initiative and do according to his will. The hope is that local communities with knowledge, skills and awareness can enhance their role in the protection of natural resources around them.

Keywords: Economic Potency, Rural Area

LATAR BELAKANG MASALAH

Desa merupakan garda terdepan bagi struktur pemerintahan di suatu negara, termasuk di Indonesia. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, istilah lain desa adalah perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan.²

Upaya membangun desa, terutama dalam membangun ekonomi masyarakat desa, menurut Bintarto dalam Suparmini, desa memiliki dua potensi yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.³

Potensi fisik diartikan sebagai (1) Tanah sebagai sumber tambang dan mineral, sumber tanaman, bahan makanan dan tempat tinggal; (2) Air, kondisis air untuk irigasi dan untuk keperluan hidup sehari-hari; (3) Iklim yang penting untuk kegiatan agraris; dan (4) Ternak sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan sumber pendapatan; (5) Manusia, baik sebagai sumber tenaga kerja potensial, sebagai pengolah lahan dan juga produsen bidang pertanian, juga sebagai tenaga kerja di bidang non pertanian.⁴

Sedangkan potensi non fisik dimaksudkan adalah (1) Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong; (2) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi organisasi sosial yang dapat membimbing memajukan masyarakat; (3) Aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran pemerintahan desa.⁵

Adanya potensi yang dimiliki oleh desa, menjadikan kekuatan bagi desa untuk diberdayakan, sehingga dapat menjadi potensi ekonomi masyarakat desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidupnya. Namun upaya pemberdayaan diperhadapkan oleh problematika klasik yang ada pada desa itu sendiri, misalnya lemahnya infrastruktur desa dan

¹ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang

³ Suparmin, *Pola Keruangan Desa dan Kota* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, 2002), h. 9

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

rendahnya kualitas sumber daya manusianya, tidak terkecuali di desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan ke depan adalah

1. Bagaimana potensi ekonomi masyarakat Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone?
2. Bagaimana problematika dihadapi masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa, tidak terlepas dari konsep pembangunan desa. Menurut Kartasmita pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: (1) memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; (2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; (3) pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan (4), membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan. Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan ekspor, antara lain; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa.⁶ Pandangan Arifin menyatakan, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku

⁶ Kartasmita. G., *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: CIDES, 1996), h. 25 -26.

agribisnis dan agroindustri di daerah. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.⁷

Namun, menurut Almasdi Syahza percepatan pembangunan desa dengan potensi yang dimilikinya dengan istilah pengembangan agropolitan.⁸ Menurutnya yang perlu dilakukan adalah: (1) merubah daerah pedesaan, dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang; (2) memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*); (3) memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru; (4) menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama; (5) menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap *agropolitan district*, termasuk peningkatan hasil pertanian; (6) merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara *agropolitan district* dengan kota; (7) menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya; (8) menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan.⁹

Menurut Syahza dalam penelitiannya, untuk mendukung pengembangan agribisnis untuk masa datang, dibutuhkan beberapa faktor antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan

⁷ Arifin. B., *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 55-56

⁸ Almasdi Syahza, "Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau" (Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004), h. 204

⁹ *Ibid*

pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri.¹⁰

Terlepas faktor pendukung, Syahza mengemukakan pula problematika yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain: 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, 2), ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah, 3) pengadaan dan penyaluran sarana produksi, 4) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, 5) lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani, dan 6) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri.¹¹

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang akan menggambarkan secara obyektif data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan metode survey dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *content analysis* dan *descriptive analysis* dengan model analisis interaktif dan tabulasi.

Menurut Weber yang dikemukakan oleh Lexy bahwa *content analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku dan dokumen.¹² *Content Analysis* digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen dan buku-buku yang terkait dengan pemberdayaan guru mengaji. Adapun *teknik deskriptive analysis* dengan model analisis interaktif bertujuan untuk memberikan

¹⁰ Almasdi Syahza, "Analisis Ekonomi Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis Di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau" (Perspektif VIII (01), 2003), h.101-112

¹¹ Almasdi Syahza, "Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau" (Jurnal Ekonomi VIII(01), 2003), : h. 33-42

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 220

gambaran tentang potensi ekonomi masyarakat yang ada di Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone dan problematika yang dihadapi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Desa Ajangpulu

1. Potensi sumber daya manusia.

Tingkat potensi sumber daya manusia yang ada di desa Ajangpulu bersarakan tingkat pertambahan penduduk dan jumlah penduduk berdasarkan struktur umur maka dapat di lihat bahwa potensi sumber daya manusia sangat besar. Kareana jumlah penduduk di dominasi oleh penduduk pada usia produktif yaitu pada usia 10 sampai 30 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah penduduk Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone berdasarkan struktur umur pada tahun 2014

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	0-4	247
2	5-9	296
3	10-14	301
4	15-29	332
5	20-24	271
6	25-29	320
7	30-34	183
8	35-39	189
9	40-44	170
10	45-49	161
11	50-55	152
12	56-59	113
13	60-64	73
14	65+	122

Sumber: Desa Ajangpulu dalam Angka Tahun 2014

2. Sumber Daya Alam

Struktur jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone dapat di persentasikan yaitu 95% Petani sawah dan kebun 5% nya adalah Pegawai. Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone merupakan daerah pertanian sehingga apabila dilihat dari data ekonominya mempunyai sub sector yang terdiri

dari perkebunan, pertanian dan peternakan, ketiga sub sektor ini mempunyai jenis komoditi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 2
Produksi Komoditas Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone
Tahun 2014

No	Sub Sektor	Jenis Komoditas
1	Perkebunan	Pohon Aren
		Kelapa
		Sayuran
2	Pertanian	Padi
		Kacang Tanah (Palawija)
		Jagung (Palawija)
3	Peternakan	Kacang Kedele (Palawija)
		Sapi
		Ayam potong
4	Pertambangan	Ayang petelur
		Pasir

Sumber: Desa Ajangpulu dalam Angka 2014

Pohon aren yang merupakan hasil perkebunan yang melimpah menjadi komoditas unggulan di Desa Ajangpulu, karena mampu menghasilkan gula aren, dan dipasarkan di Kota Watampone bahkan ke Makassar. Sedangkan untuk padi yang menjadi sektor unggulan kedua hanya mampu mencapai konsumsi lokal di Desa Ajangpulu.

Problematika Potensi Desa Ajangpulu dan Solusi Permasalahan

Sesungguhnya potensi desa yang ada di Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten, juga merupakan problematika potensi desanya, baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, tetapi problematika yang paling mendasar adalah infrastruktur yang mendukung adanya pengembangan potensi desa tersebut dan peningkatan roda perekonomiannya yang sangat terbatas. Seperti jalan desa yang kondisinya belum tersentuh aspal, padahal jalan desa adalah akses yang paling penting dalam mendistribusikan sumber daya alam desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

Namun demikian, secara rinci adapun pemecahan problematika potensi desa dapat dilakukan dengan berbagai pengembangan sebagai berikut :

1. Potensi yang dikembangkan

Potensi yang memungkinkan untuk di kembangkan di desa Ajangpulu berdasarkan hasil identifikasi dan analisis potensi wilayah maka

potensi yang akan di kembangan menjadi dua yaitu:

a. Sumber daya manusia

Potensi di sumber daya manusia ayang ada di Desa Ajangpulu terlihat dari banyaknya penduduk pada usia produltir yaitu pada usia 15 sampai dengan 45 tahun. Di Desa Ajangpulu potensi penduduk pada usia produktif sebanyak 2.185 jiwa.

Dengan jumlah penduduk produktif tersebut maka perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat di wujudkan di masa selanjutnya.

b. Sumber Daya Alam

Potensi sunber daya alam yang melimpah akan menjadi potensi yang paling dominan untuk dikembangkan dalam menyongsong peningkatan kesejahteraan masyarakat potesi sumber daya alam tersebut antara lain yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Perkebunan
- 3) Peternakan dan

Pengembangan potensi tersebut didukung oleh kondisi topografi dan kemiringan lereng yang ada pada tingkat 2% - 8 % atau kemiringan lereng yang relati datar serta luasnya lahan basah di desa tersebut.

2. Sistem Pengelolaan Potensi

Sistem pengelolaan potensi agar dapat terealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Pendekatan struktural.

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah desa Ajangpulu maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

- 1) Pengembangan jaringan pendukung.
- 2) Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Pengembangan kapasitas kelembagaan.

- 3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
- 4) Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
- 5) Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
- 6) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.

b. Pendekatan Subyektif.

Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :

- 1) Penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat.
- 2) Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperanserta.
- 3) Pengembangan kualitas diri.
- 4) Pengembangan kapasitas masyarakat.
- 5) Pengembangan keterampilan masyarakat.
- 6) Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.
- 7) Untuk merealisasikan hal tersebut dapat dilakukan sekurang-kurangnya antar lain sebagai berikut:
 - (a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
 - (b) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesaan.
 - (c) Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian lingkungan.
 - (d) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah Desa Ajangpulu dan Kecamatan Cina Kabupaten

Bone.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Pada data yang menguraikan fasilitas transportasi di Desa Ajangpulu yang sangat minim, ini dapat menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut kurang maju dalam berbagai hal, karena fasilitas transportasi adalah hal utama dalam pembangunan suatu wilayah.
2. 1. Potensi ekonomi di Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone yaitu berpotensi dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
2. Dengan adanya berbagai potensi yang dimiliki Desa Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone maka mempermudah dalam pengembangan suatu wilayah sehingga kesejahteraan masyarakat setempat meningkat.
3. Problematika potensi desanya, baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, tetapi problematika yang paling mendasar adalah infrastruktur yang mendukung adanya pengembangan potensi desa tersebut dan peningkatan roda perekonomiannya yang sangat terbatas.
4. Pemecahan masalah potensi desa melalui dua yaitu pertama, pendekatan struktural yaitu tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah desa Ajangpulu maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Harapannya masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kedua, pendekatan subyektif (non struktural), yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Harapannya bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan perannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B., Arifin. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- G., Kartasamita. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suparmin. *Pola Keruangan Desa dan Kota*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, 2002.
- Syahza, Almasdi. "Analisis Ekonomi Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis Di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau". *Perspektif VIII* (01), 2003.
- , "Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau". *Jurnal Ekonomi VIII*(01), 2003.
- , "Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau". Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang*